

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep karakter dan pendidikan kebangsaan, merupakan dua konsep yang memiliki keterkaitan satu sama lain dalam perkembangan masyarakat yang dinamis. Masyarakat dan bangsa Indonesia mengalami keterpurukan di dalam segala bidang aspek kehidupan (Tilaar, 2009, hlm. 116). Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah krisis multidimensional dan degradasi moral karakter bangsa, serta isu disintegrasi bangsa sehingga pendidikan karakter dianggap menjadi solusi alternatif yang ampuh untuk menghadapi permasalahan moral bangsa yang makin memburuk. Contohnya, anak tidak lagi hormat pada orang tua, kehidupan bebas remaja, bahkan hampir 50% dari remaja dunia terutama kaum perempuan, sudah kehilangan mahkota paling berharga miliknya, dan 80% sudah berani mencoba dan menggunakan obat-obatan terlarang (narkotika) (Anastasya, 2013).

Munculnya kembali konsep pendidikan kebangsaan di kalangan akademisi, diharapkan agar menjadi solusi dari isu disintegrasi bangsa yang makin berkembang. Bahkan nomenklatur pendidikan kebangsaan menurut Ki Hajar Dewantara sudah memakai konsep pendidikan kebangsaan dalam proses pengajarannya pada perguruan Taman Siswa. Permasalahan lainnya yakni permasalahan moral dipicu juga karena adanya kontrol media dan keluarga yang kurang, serta adanya globalisasi dan serbuan budaya dari luar membuat sebagian generasi muda kita yang mengikuti budaya luar sehingga budaya sendiri terkesampingkan.

Tilaar (2009. hlm.19; Newsweek, 2000) mengungkapkan bahwa “masyarakat dan bangsa Indonesia kini berada di dalam era baru, era reformasi. Era reformasi sebagian merupakan perubahan yang besar melanda Asia”. Di dalam masa transisi menuju masyarakat baru yang demokratis telah melahirkan suatu euphoria yang mampu bermuara pada disintegrasi bangsa, terlepas dari pengendalian diri. Hal ini disebabkan oleh lepasnya kungkungan yang telah

membatasi kemerdekaan seseorang. Namun dilihat dari segi perubahan masyarakat baru maka krisis yang terjadi pada dewasa ini adalah suatu krisis kebudayaan. Perubahan masyarakat baru (masyarakat global) merupakan masyarakat yang berkembang pesat, persaingan, penggunaan informasi tanpa batas serta memungkinkan lahirnya ide- ide baru (hasil dari persaingan manusia-manusia unggul yang haus akan perubahan) yang perlu dimanfaatkan untuk kepentingan bersama (Tilaar, 2009. hlm. 25). Di dalam persaingan global, suatu bangsa perlu menjadi bangsa yang inovatif agar menjadi bangsa yang unggul. Maka perlu adanya tatanan nilai dan kebijakan yang kuat agar krisis kebudayaan dan disintegrasi bangsa tidak terjadi di Indonesia.

Tilaar menambahkan salah satu yang menjadi masalah terbesar abad 21 adalah munculnya kesadaran akan identitas suatu bangsa atau suku bangsa (2009. hlm. 116; Eley & Ronal, 1996). Karena disebabkan oleh adanya dua gelombang besar di dalam perubahan sosial, yakni globalisasi dan demokrasi. *Pertama*, Globalisasi akan dapat mengancam budaya bangsa (Tilaar, 2009. hlm.4). Budaya global akan muncul dan dapat mematikan budaya lokal, dan sangat berbahaya. Karena sebab hancurnya budaya lokal, berarti lunturnya identitas suatu bangsa. Seorang penulis asal Kenya bernama Ngugi Wa Thiong'o menyebutkan bahwa perilaku dunia Barat, khususnya Amerika seolah-olah sedang melemparkan bom budaya terhadap rakyat dunia. Mereka berusaha untuk menghancurkan tradisi dan bahasa pribumi sehingga bangsa-bangsa tersebut kebingungan dalam upaya mencari identitas budaya nasionalnya. Penulis Kenya ini meyakini bahwa budaya asing yang berkuasa di berbagai bangsa, yang dahulu dipaksakan melalui imperialisme, kini dilakukan dalam bentuk yang lebih luas dengan nama globalisasi (Anastasya, 2013).

Salah satu kick back dari arus globalisasi yakni adanya keinginan manusia untuk lepas dari arus yang dapat mengeliminasi atau memarginalkan identitas suatu masyarakat, suku, maupun identitas seseorang. Negara yang menonjolkan identitas kesukuan akan menjadi ancaman terhadap integritas negaranya, seperti yang dialami oleh Indonesia dewasa ini. Gerakan-gerakan separatisme mulai bermunculan dan kelihatan di berbagai daerah, sebagai salah satu ekspresi dalam mencari identitasnya yang tentunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan

suatu negara bangsa. Budaya konsumerisme dalam era globalisasi cenderung menghilangkan budaya lokal atau roh dari kehidupan suatu masyarakat (Tilaar, 2012. hlm. 175).

Kebijakan pendidikan dalam era globalisasi hendaknya juga diarahkan pada membangun memperkuat rasa harga diri manusia, karena dengan rasa harga diri yang kuat dalam diri setiap individu mempunyai kemerdekaan. Kebijakan pendidikan ini merupakan kebijakan pendidikan yang didasarkan kepada moral Pancasila, yang didalamnya terdapat identitas manusia, identitas kelompok, identitas suatu bangsa sebagai ungkapan dari kemerdekaan seorang individu dalam menentukan eksistensinya mereka di dunia. Namun, persoalan merosotnya pendidikan semakin memojokkan bangsa Indonesia ke tepi jurang kehancuran (Saksono, 2010. hlm. 14).

Pendidikan mempunyai tugas utama untuk memerdekakan bangsa (banyak orang yang berasumsi kita sudah merdeka; 17 Agustus 1945 baru pernyataan kemerdekaan; Indonesia sekarang masih dalam cengkraman Neoliberalisme), dan untuk memerdekakan bangsa menurut Ki Hajar Dewantara adalah melalui pendidikan kebangsaan (Saksono, 2010. hlm. 14-15). Pendidikan yang memerdekakan bangsa tiada lain adalah pendidikan untuk rakyat dan berpihak kepada rakyat. Pendidikan untuk rakyat, tujuannya memerdekakan rakyat. Ada tiga sifat kemerdekaan: berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur diri sendiri, oleh karenanya pengajaran dan pendidikan harus berdaulat (Wuryadi, 2009; Saksono, 2010. hlm. 16).

Kedua, yang menjadi penyebab munculnya masalah identitas bangsa adalah berkembang suburnya demokrasi. Demokrasi dan identitas merupakan dua prinsip yang saling mengisi (Tilaar, 2009. hlm. 117). Menurut Dahl (2001. hlm. 203), “salah satu bahaya atau masalah dalam masyarakat demokrasi ialah kemungkinan terjadinya konflik budaya”. Harian Tempo (2015) mencatat beberapa tragedi konflik budaya di Indonesia yang bersumber karena adanya perbedaan budaya, diantaranya 1) Tragedi Sampit, tragedi ini bermula dari konflik antara kelompok etnis Dayak dan Madura yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah; 2) Konflik Maluku, konflik kekerasan dengan latar belakang perbedaan agama yakni antara kelompok Islam dan Kristen; dan 3) Konflik 1998, Krisis ekonomi berujung

menjadi konflik sosial pada penghujung Orde Baru. Konflik budaya dapat diatasi dengan saling mengerti antarkelompok dan perlu adanya toleransi yang tinggi antarsesamanya.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang cepat, terdapat berbagai masalah moral yang muncul termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk-bentuk penurunan moral yang lainnya. Terdapat beberapa gejala penurunan moral menurut Lickona (2015, hlm. 31), antara lain:

kekerasan dan tindakan anarki yang semakin marak, pencurian, tindakan curang, pengabaian terhadap aturan yang berlaku, tawuran antarsiswa, ketidaktoleran, penggunaan bahasa yang tidak baik, kematangan seksual yang terlalu dini dan penyimpangannya serta sikap perusakan diri. Gejala-gejala penurunan moral tersebut merupakan gambaran tentang pengabaian generasi muda terhadap kepekaan moral merupakan sebuah kegagalan yang menuai masalah serius menyangkut etika dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan Mulyasa (2014. hlm. 248), menyebutkan bahwa permasalahan bangsa saat ini, meliputi:

- 1) diorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa;
- 2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila;
- 3) bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa;
- 5) ancaman disintegrasi bangsa;
- 6) melemahnya kemandirian bangsa.

Tantangan-tantangan yang akan dihadapi (Tilaar, 2004 hlm. 61), meliputi 1) Pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara; 2) Sistem hukum yang adil; 3) Sistem politik yang demokrasi; 4) Sistem ekonomi yang adil dan produktif; 5) Sistem budaya yang beradab; 6) Sumber daya manusia yang bermutu; 7) Eksistensi dan integritas bangsa dalam era globalisasi. Hal inilah yang dari dulu sudah terpikirkan oleh para tokoh bangsa kita, membangun pendidikan dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai bangsa.

Sebagian gejala penurunan moral tersebut menyiratkan bahwa perlunya pembangunan bangsa melalui pembangunan karakter budaya kearifan lokal yang ada. Alwasilah (2009, hlm.14) menegaskan bahwa “pemikiran lokal dan global tentunya memiliki jarak waktu, dan konsep yang berlainan; oleh karenanya dalam

pengejawantahannya perlu reinterpretasi cerdas, dan hal ini menunjukkan bahwa nilai memiliki kekuatan dinamis (*values is dynamic force*). Dalam penulisan karya ilmiah, kita lebih sering menggunakan teori dari negara Barat. Padahal, bangsa Indonesia sendiri memiliki pemikir-pemikir yang menghasilkan teori yang idenya sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa serta memasukkan kearifan lokal dalam ide pemikirannya. Budaya Indonesia merupakan aset dan keberagaman bangsa yang perlu di lestarikan dan dijaga keberadaannya, mulai dari nilai-nilai luhur bangsa yang menjadi karakter dan jati diri bangsa, ragam kebudayaan (adat istiadat, suku bangsa, etnik, serta keunikan yang dimiliki dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai pulau Rote). Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa, “semua suku bangsa yang ada di Nusantara, memiliki kebudayaannya masing-masing dan mempunyai nilai-nilai luhur tersendiri yang dapat dikembangkan dan disumbangkan untuk membangun kebudayaan nasional Indonesia” (Tilaar, 2012. hlm. 56).

Selain itu, pendidikan di sekolah selama ini telah banyak menerapkan berbagai sistem dan metode pendidikan, serta pembelajaran yang berasal dari negara-negara barat. Memang sistem tersebut berhasil, namun tidak sedikit pula karena tidak sesuai dengan nilai dan budaya bangsa Indonesia atau bahkan bertentangan maka sistem tersebut tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Maka, praktik teori dan filsafat pendidikan tersebut masih juga dianggap kurang memuaskan baik di luar negeri, seperti Amerika Serikat (Gess-Newsome, dkk:2003) maupun di Indonesia (Tafsir, 2007:8). Dari perspektif ini, perlu dicari model pelaksanaan teori pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan Indonesia, dengan kata lain bersifat kontekstual (Wangid, 2009. hlm.129).

Indonesia sendiri memiliki para tokoh pendidikan bangsa yang memiliki pemikiran yang visioner dan yang sekarang pemikirannya bahkan dibukukan serta mereka abadikan dengan membangun sekolah sebagai implementasi dari pemikirannya, diantaranya: (1) Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan Bapak Pendidikan Indonesia yang mendirikan Taman Siswa; (2) Muhammad Syafei yang mendirikan INS Kayu Tanamnya dengan nilai-nilai luhur budaya Minangkabau yang dipegang. Beliau menghendaki peserta didik tidak menjadi

cedekiawan setengah matang yang angkuh, melainkan menjadi sosok yang cekatan dan rendah hati (Suparlan, 2004, hlm. 184); (3) Dewi Sartika dengan mendirikan Sekolah Dewi Sartika; dan (4) Romo Mangun yang mendirikan Dinamika Edukasi Dasar (DED) pada 1997. DED merupakan sarana pendidikan dasar untuk anak bangsa terutama bagi masyarakat miskin. Mereka adalah para tokoh pendidikan yang memiliki pemikiran yang luar biasa untuk kemajuan pendidikan di Indonesia tanpa adanya intervensi dari unsur pendidikan dari luar. Sekolah-sekolah yang mereka dirikan pun hingga saat ini tetap eksis dan menjadi ragam kemajuan pendidikan di Indonesia yang telah begitu banyak mengalami perubahan kurikulum dari masa ke masa.

Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh yang memiliki banyak tulisan membahas mengenai karakter bangsa serta pengajaran dan pendidikan dengan dasar kebangsaan. Hal ini terlihat dari salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh Tamansiswa, yakni “menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas lahir batin, berbudi pekerti luhur, memiliki rasa nasionalisme, dan memiliki rasa cinta terhadap Indonesia, untuk membentuk manusia-manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter” (Musyafa, 2015. hlm. 395). Selain itu, Ki Hajar Dewantara bermaksud agar pendidikan nasional tidak adanya diskriminasi, memiliki kemandirian dan merdeka dari pengaruh pendidikan barat. Hal ini sama dengan Romo mangun dan Ivan Ilich, yang menginginkan agar mengubah tujuan dan proses pendidikan disekolah yang bertujuan untuk pemerdekaan peserta-didik dari berbagai proses indoktrinasi serta pemejaraan berpikir kreatif dan inovatif peserta-didik (Tilaar, 2012. hlm. 72).

Selanjutnya, Haryanto (2011, hlm.23) mengemukakan bahwa, “asas dan dasar pendidikan yang digagas Ki Hadjar Dewantara merupakan landasan yang kokoh untuk membangun karakter bangsa yang bersendi pada budaya bangsa dengan tidak mengabaikan budaya asing”. Pendidikan di Indonesia haruslah menanamkan karakter dan jiwa kebangsaan yang berasal dari akar budaya bangsa dan jelas berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, filosofi dan nilai luhur bangsa.

Hal ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3

yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah “untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”. Supaya terwujudnya tujuan pendidikan nasional, diperlukan pendidikan yang mampu menanamkan karakter dan jiwa kebangsaan. Tujuan pendidikan nasional senada dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang ingin dicapai, yakni (1) meningkatkan kemandirian, (2) menumbuhkan semangat dan rasa kebangsaan, serta (3) berakar pada kebudayaan nasional (Suparlan, 2004, hlm.183). Apalagi sekarang bangsa Indonesia dihadapkan dengan era globalisasi, diantaranya Indonesia sudah memasuki MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang per 1 Januari 2016 sudah dilaksanakan dan APEC (*Asia-PASIFIC Economic Cooperation*) yang akan mulai di berlakukan tahun 2020. Maka, diperlukan pendidikan karakter dan pendidikan kebangsaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memiliki daya tarik bagi bangsa Indonesia dan terutama bagi peneliti sendiri adalah pemikiran beliau mengenai karakter dan pendidikan kebangsaan. Menurut Ki Hajar Dewantara karakter dan pendidikan kebangsaan yang ada di Indonesia jelas berbeda dengan di negara-negara barat. “Pengajaran harus bersifat kebangsaan. Jika pengajaran bagi anak-anak tidak berdasarkan kenasionalan, maka anak-anak tak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa dan makin terpisah dari bangsanya, kemudian bisa menjadi lawan kita. Sebab pengajaran nasional itu adalah hak dan kewajiban kita” (Dewantara, 1982; 2013). Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa, “pendidikan nasional seharusnya menimbulkan rasa cinta terhadap kebudayaan dan kebatinan (*mental culture*) sendiri” (Dewantara, 2013. hlm. 88).

Dewantara (2013. hlm. 139) juga mengungkapkan bahwa, a) pengajaran rakyat haruslah bersemangat keluhuran budi manusia; karenanya harus mementingkan segala nilai kebatinan (*mental culture*) dan menghidupkan semangat idealism; b) pengajaran rakyat harus mendidik kearah kecerdasan budi pekerti, yakni masaknya jiwa seutuhnya (*character building*); c) pengajaran rakyat harus mendidik kearah kekeluargaan, yakni merasa bersama-sama hidup, bersama-sama susah dan senang, bersama-sama tanggung jawab, dsb; mulai

kekeluargaan dalam lingkungan kecil, sampai kekeluargaan yang besar (misalnya kekeluargaan bangsa-bangsa).

Pendidikan nasional menurut paham Taman Siswa yakni, pendidikan yang beralaskan garis hidup dari bangsanya (*cultureel-nationaal*) dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan (*maatschappelijk*) yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja bersama-sama dengan bangsa lain untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia. Jangan pula dilupakan bahwa bangsa kita memiliki kebudayaan yang tidak rendah nilainya dan beraneka-warna isinya, diantaranya berbagai kesenian berderajat, juga diukur dengan ukuran internasional (Dewantara, 2013. hlm 354). Banyak kesenian-kesenian kebangsaan kita yang hingga kini masih patut dipelihara. Disamping pemeliharaan kesenian-kesenian yang merupakan peninggalan nenek moyang kita yang bermutu tinggi, kita perlu juga memberikan kepada anak-anak segala sesuatu yang baru, yang dapat memperkaya maupun memperkembangkan hidup kesenian rakyat kita, sekalipun dengan menggunakan bahan-bahan dari kebudayaan bangsa-bangsa lain.

Dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan keanekaragaman budaya dan keunikan serta kekhasan yang menyertai budaya bangsa, namun juga terbuka dengan masuknya kebudayaan baru dari bangsa lain dengan tetap memiliki rasa kecintaan dengan tanah air dan budaya yang dimiliki. Budaya baru seharusnya tidak menggantikan posisi kearifan lokal atau budaya lokal, tetapi menjadi keunikan dalam keberagaman menjadi budaya global. Proses pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terjadi di dalam habitus yang sentripetal, artinya yang berpusat dari budaya lokal dan berangsur-angsur meningkat kepada lingkungan semakin luas sampai kepada budaya nasional bahkan budaya global (Tilaar, 2012. hlm. 56). Inilah prinsip yang modern dari perguruan Tamansiswa, yang sejak awal telah mengenal prinsip-prinsip pendidikan multikultural yang marak pada abad ke-21.

Berangkat pada pemaparan tersebut menjadi ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk membahas mengenai figur Ki Hajar Dewantara, terutama mengenai pemikiran aktifitas pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang konsep karakter dan pendidikan kebangsaan yang diterapkan dalam pendidikan nasional, bagaimana

latar belakang pemikiran tersebut muncul, dan seberapa berpengaruh pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara terhadap kiprah dalam pendidikan dan perkembangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ketertarikan akan pemikirannya dituangkan dalam tesis yang berjudul “**KAJIAN PEMIKIRAN KI HAJAR DEWANTARA TENTANG KARAKTER DAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN**”. Hal ini disebabkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dianggap relevan untuk dikaji kembali di era modern ini, dan juga nilai-nilai serta pemikirannya yang tidak pernah hilang dari zaman ke zaman. Penelitian ini dilakukan untuk mencari sebuah konsep yang utuh dalam rangka menumbuhkan kesadaran nasional, dan menambah pendalaman dalam kajian keilmuan pendidikan kewarganegaraan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini, serta sejauh mana keterkaitan dan relevansi pemikirannya untuk di era modern ini. Karya besar Ki Hajar Dewantara perlu terus dikembangkan melalui kajian teoritis dan praktis.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang muncul dalam pembelajaran PPKn yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Landasan yang kokoh untuk membangun karakter bangsa bersendi pada budaya bangsa dengan tidak mengabaikan budaya asing. Pendidikan di Indonesia haruslah menanamkan karakter dan jiwa kebangsaan yang berasal dari akar budaya bangsa dan jelas berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, filosofi dan nilai luhur bangsa. Namun kenyataannya kita terbuai dengan arus globalisasi, sehingga bangsa Indonesia mengalami krisis multidimensional dan degradasi moral bangsa, serta ditambah dengan isu disintegrasi bangsa.
2. Pengajaran seharusnya, a) memiliki semangat keluhuran budi manusia; karenanya harus mementingkan segala nilai kebatinan (*mental culture*) dan menghidupkan semangat idealisme; b) mendidik kearah kecerdasan budi pekerti, yakni masaknya jiwa seutuhnya (*character building*); dan c) mendidik kearah kekeluargaan, yakni merasa bersama-sama hidup,

bersama-sama susah dan senang, bersama-sama tanggung jawab, dsb; mulai kekeluargaan dalam lingkungan kecil, sampai kekeluargaan yang besar (misalnya kekeluargaan bangsa-bangsa). Namun, kenyataannya sebaliknya pengajaran kebanyakan hanya mengajarkan dalam hal transfer ilmu ke siswa, dan mengenyampingkan mendidik nilai karakter.

3. Pemikiran lokal dan global tentunya memiliki jarak waktu, dan konsep yang berlainan; oleh karenanya dalam pengejawantahannya perlu reinterpretasi cerdas, dan hal ini menunjukkan bahwa nilai memiliki kekuatan dinamis (*values is dynamic force*). Oleh karenanya, penggunaan pemikiran lokal mampu menjadi bahan dalam kajian dan memperkuat teori. Namun kenyataannya, pemikiran-pemikiran barat lebih banyak digunakan daripada pemikiran lokal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian di atas, secara umum rumusan masalah penelitian yakni bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang karakter dan pendidikan kebangsaan?

Dalam hal ini, rumusan masalah dibatasi dengan kajian penelitian yang terfokus pada pembahasan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang karakter dan pendidikan kebangsaan. Adapun rumusan masalah secara khusus dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Bagaimana pokok-pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang karakter bangsa dan pendidikan kebangsaan di Indonesia?
- 2) Sumber-sumber pemikiran apa yang menginspirasi pemikiran Ki Hajar Dewantara?
- 3) Bagaimana implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang karakter bangsa dan pendidikan kebangsaan terhadap pendidikan di Indonesia?
- 4) Bagaimana relevansi pemikiran karakter bangsa dan pendidikan kebangsaan Ki Hajar Dewantara dalam keilmuan pendidikan kewarganegaraan?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk memberikan kajian secara filosofis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai karakter dan pendidikan kebangsaan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan yang lebih khusus sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pokok-pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang karakter dan pendidikan kebangsaan.
- Untuk mengetahui pemikir yang menjadi inspirasi pemikiran Ki Hajar Dewantara.
- Untuk mengetahui penerapan pemikiran karakter dan pendidikan kebangsaan dalam pendidikan di Indonesia.
- Untuk mengetahui relevansi pemikiran karakter dan pendidikan kebangsaan Ki Hajar Dewantara dalam keilmuan pendidikan kewarganegaraan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Dari Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan keilmuan dalam bidang kewarganegaraan, khususnya segi karakter dan pendidikan.

1.5.2 Dari Segi Praktis

Dari segi praktik, harapannya dalam praktik pendidikan dapat ditingkatkan menuju arah dan cita-cita bangsa Indonesia. Sehingga generasi berkarakter dan berjiwa kebangsaan dapat terlahir dari pendidikan.

1.5.3 Dari Segi Kebijakan

Penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan referensi dan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku maupun yang akan diberlakukan. Harapannya kajian pemikiran tentang pendidikan karakter dan pendidikan kebangsaan, menjadi pengkajian yang evaluatif dan berkontribusi dalam pemikiran serta ide untuk konsep pendidikan yang lebih baik.

1.5.4 Dari Segi Aksi Sosial

Harapannya dapat memberikan gambaran dan arahan untuk menjalani perilaku sehari-hari yang dapat mendukung terwujudnya insan Indonesia yang berkarakter dan memiliki rasa kebangsaan. Aksi sosial yang dilakukan tidak selalu untuk pemegang kebijakan, melainkan untuk masyarakat Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari.

1.6 Struktur Organisasi Tesis

Pada penyusunan tesis ini struktur organisasi penulisan mencakup lima bab diantaranya:

BAB I Pendahuluan

BAB II Kajian Pustaka, Kerangka Berpikir

BAB III Metode Penelitian

BAB IV Temuan dan Pembahasan

BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Bab satu merupakan pendahuluan, yang menguraikan pemikiran yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis. Latar belakang masalah merupakan konsepsi-konsepsi awal yang berisikan pernyataan, fakta, opini dan mengantarkan penulis pada berbagai permasalahan yang harus diselesaikan dalam upaya memperkuat alasan untuk penulisan tesis. Rumusan masalah merupakan rumusan-rumusan pertanyaan yang disusun penulis untuk membatasi, memudahkan dan memfokuskan penulisan. Tujuan masalah meliputi maksud, arah, atau sasaran yang hendak dicapai penulis dalam upaya penulisan

Ana Mentari, 2017

KAJIAN PEMIKIRAN KI HAJAR DEWANTARA TENTANG KARAKTER BANGSA DAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tesis. Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari penelitian yang akan mendukung penulisan tesis. Sistematika penulisan merupakan susunan dari kegiatan-kegiatan penulisan dan menjadi penjelasan umum dari masing-masing bagian.

Bab dua berisikan kajian pustaka atau landasan teori, yang menguraikan telaah terhadap berbagai literatur dan referensi yang akan digunakan untuk memperkuat tesis. Termasuk didalamnya berupa kajian terhadap teori-teori yang dianggap relevan dalam memberikan penjelasan, pemaknaan, dan analisa terhadap masalah yang ada. Pada bab ini, penulis memberikan pemaparan dan rujukan dari berbagai referensi, literatur, atau teori yang dianggap relevan dan dapat digunakan dalam mendukung penulisan tesis.

Bab tiga merupakan metodologi penelitian, yang menguraikan cara kerja dan proses serta langkah-langkah penelitian dan tahapan yang digunakan penulis dalam penyusunan tesis. Tahapan ini mencakup, proses mencari, dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan fokus dan bahan kajian. Selanjutnya, penulisan dan interpretasi yakni proses menafsirkan untuk ditulis menjadi sebuah karya ilmiah. Bagian ini merupakan pemaparan secara terperinci dari garis besar desain penelitian yang digunakan.

Bab empat merupakan pembahasan atau isi, yang berisikan penjelasan terhadap aspek-aspek yang dipertanyakan dalam rumusan masalah. Bab ini juga berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mendorong atau mempengaruhi didalam penelitian ini.

Bab lima merupakan simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Bab ini berisikan interpretasi penulis terhadap temuan-temuan hasil penelitian yang diperoleh dalam penulisan tesis ini.